



Pam Pemilu 2004



PEMILU sudah diambang pintu, sudah banyak pula yang diributkan baik oleh KPU, Panwaslu, maupun oleh partai plus Caleg masing-masing berkaitan dengan Pemilu 2004.

Bentuk-bentuk pelanggaran juga bermunculan—ada istilah mencuri start, pemalsuan ijazah caleg, dsb. Apakah indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan bisa diterima dengan akal sehat?

Diperkirakan akan banyak bermunculan bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu 2004, karena dalam setiap tahapan Pemilu pasti memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda, seperti tahapan kampanye dan pemungutan suara.

Polri, sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang penuh terhadap pengamanan pemilu 2004. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk lebih profesional dan proporsional. Persiapan yang lebih dini tentunya menjadi *warming up* untuk pelaksanaan tugas yang tergolong berat ini. Karenanya, geliat bentuk kesiapan telah nampak dilakukan oleh jajaran Polri.

Belum lama ini, dilaksanakan gelar pasukan dan penyerahan peralatan materiil

Proses reformasi ke arah kehidupan demokrasi yang sehat, apakah dapat terlihat dalam pelaksanaan Pemilu 2004? Ada yang mengatakan Pemilu 2004 merupakan contoh tahapan dalam proses reformasi ke arah demokratisasi yang menghadapkan kita pada situasi dan pilihan kompleks dan dilematis. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2004. Ini merupakan salah satu rangkaian dari proses managerial Polri dalam rangka mengukur tingkat kesiapannya. Disamping itu, kegiatan ini juga menjadi bukti keseriusan Polri dalam menghadapi tugas pengamanan tersebut. Tujuannya agar, masyarakat dan para penyelenggara pemilu 2004 dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, karena merasa mendapat jaminan keamanan dari polri.

Bagi Polri sendiri, tugas pengamanan pemilu 2004 ini, merupakan kepercayaan dan kehormatan yang patut dibanggakan. Pasalnya, pemilu 2004 ini, jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan merupakan pesta demokrasi yang paling bersejarah. Selain itu, pemilu kali ini juga dilaksanakan ditengah-tengah tantangan tugas Polri yang

cenderung semakin berat dan kompleks.

Berkaca pada pengalaman masa lalu, kampanye dan pemungutan suara menjadi tahapan yang memerlukan perhatian khusus. Keduanya memerlukan konsentrasi penuh dari jajaran aparat keamanan, khususnya kepolisian untuk bisa berada pada posisi yang dapat dirasakan **netral**, adil dan tidak diskriminatif.

Namun upaya itu tidaklah mudah dan sederhana yang dibayangkan. Polri dihadapkan pada realita banyaknya peserta pemilu, yakni 24 parpol. Mereka semua diberi kesempatan untuk berkampanye dengan adil. Padahal, waktu yang tersedia relatif singkat dan terbatas. Belum lagi, jika terdapat pandangan adanya lokasi dan waktu-waktu tertentu yang dinilai strategis dan penting. Disinilah tantangan Polri untuk bekerja secara profesional, agar



002

dapat mengatur kegiatan kampanye yang tidak menimbulkan kerusuhan.

Oleh karena itu, Polri telah membuat kebijakan, yaitu **“Polri siap mengamankan pemilu 2004 sebagai wahana pesta demokrasi untuk mengantarkan bangsa Indonesia dalam memilih dan menentukan pemimpinnya secara demokratis”**.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, Polri telah menggelar operasi mandiri kewilayahan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, akan menggelar operasi kepolisian dengan sandi OPERASI MANTAP BRATA XII-2004 dengan pola khusus terpusat yang dilaksanakan bersama satgas Mabes Polri dan Polda dibantu instansi terkait, baik TNI, LINMAS, ataupun mitra KAMTIBMAS lainnya. Dalam operasi tersebut, Polri lebih mengedepankan kegiatan pencegahan dan kegiatan penegakan hukum.

Bukti keseriusan lainnya, dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah Polri lakukan bersama dengan parpol peserta pemilu 2004. Berkat kerja sama tersebut, kini telah terbentuklah FORUM KOMUNIKASI PESERTA PEMILU. Disamping itu, Kapolri dengan jaksa Agung dan Ketua Panwaslu telah menandatangani kesepakatan bersama tentang **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Secara Terpadu**. Dengan kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat menjadi ikatan moral agar kegiatan kampanye yang memiliki potensi kerawanan itu tidak berkembang menjadi gangguan, demikian juga pada saat pemungutan suara.

Selain itu guna mendukung seluruh kegiatan pengamanan tersebut, telah dipersiapkan sarana dan prasarana kodal agar tercapai kinerja yang optimal. Beberapa Kapolda telah menerima materiil peralatan berupa pesawat terbang Cassa NC 212-200, helikopter BO-105, helikopter Enstrom 480-B, kapal patroli, serta peralatan dalmas dan peralatan unit laka.

Peralatan yang dibeli dari uang rakyat tersebut, menurut Kapolri Jenderal Polisi

Drs. Da'i Bachtiar, hendaknya digunakan semaksimal mungkin guna mendukung pengamanan pemilu 2004 agar yang sukses, aman, tertib. Kapolri mengharapkan agar peralatan tersebut dipelihara dengan baik supaya usia pakainya menjadi lebih lama. Selain itu, polisi juga harus menghindari pemakaian diluar dinas, karena peralatan tersebut memang hanya diperuntukan bagi kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi pribadi.

LIMA PESAN KAPOLRI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Guna mengoptimalkan terciptanya situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif menjelang pemilu 2004, ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu;

1. Segera lakukan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kesiapan menghadapi pengamanan pemilu 2004. Termasuk penggelaran pasukan pengamanan pemilu di wilayah secara terkoordinasi dan terpadu, baik dari unsur Polri, Linmas maupun unsur bantuan TNI dan komponen pengamanan lainnya.
2. Segera idenifikasi peta kekuatan tiap-tiap parpol serta kerawanan yang mungkin dapat terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 2004, sehingga dengan mengenali karakter dan potensi masing-masing pendukung, agar kita dapat melaksanakan tugas pengamanan tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Terhadap peralatan materiil dalam rangka mendukung pengamanan pemilu hendaknya segera distribusikan, dipelihara dengan baik, penggunaan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya agar tujuan dari pengadaan peralatan tersebut dapat tercapai.
4. Laksanakan tugas pengamanan ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Hindari sejauh mungkin tindakan yang menjurus pada tindak kekerasan, bertindaklah secara proporsional dan profesional, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Warnailah setiap tindakan dengan semangat sebagai sosok pelindung, pengayom serta pelayan bagi masyarakat.



Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Drs Makbul Padmanagara bersama pimpinan parpol.

Pola Beat Polda Metro Jaya

Tak lama lagi pemilihan umum (pemilu) 2004, akan mulai digelar. 24 partai politik akan bertarung dalam pemilihan umum tersebut. Banyak prediksi tentang gejolak yang bakal terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004. Pasalnya, setiap kegiatan tahapan pemilu pasti memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda, dan yang memerlukan perhatian khusus dari segi keamanan yakni, pada tahapan kampanye dan pada saat pemungutan suara.

berbagai kegiatan, seperti; kerja sama dengan KPU—dalam sosialisasi kegiatan dan pelaksanaan pemilu. Kemudian membentuk forum penegakan hukum dan tim tindak pidana pemilu, dengan Panwaslu dan Kejati. Dan membuat kesepakatan



2004, sudah pasti akan memanaskan suhu politik di tanah air. Namun, semua itu ternyata tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melaksanakan gawe besar

PREDIKSI bakal muncul berbagai kekuatan politik baik yang berbasis sosialis, religius, dan nasionalis yang dapat memicu konflik antar basis kekuatan menjelang dan saat pemilu

tersebut, dan sebagai pernyataan keseriusan dalam menghadapi pengamanan pemilu 2004, pihak kepolisian juga telah menyiapkan berbagai pola pengamanan pemilu 2004, sehingga masyarakat dan penyelenggara pemilu 2004 dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, karena telah mendapat jaminan dari Polri.

Dalam rangka melihat keseriusan Polri di dalam menghadapi tugas pengamanan pemilu 2004, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Makbul Padmanagara, telah melakukan





bersama dengan partai politik untuk melaksanakan pemilu agar aman dan sukses.

Selain itu, tingkat kesiapan pengamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menjadi prioritas utama. Mengingat ancaman situasi kamtibmas yang bakal terjadi akan berkembang, khususnya menghadapi Pam Pemilu 2004. Guna menghadapi kemungkinan ancaman tersebut, Polda Metro Jaya telah menerapkan strategi untuk pengamanan pemilu 2004, yakni dengan menyusun lapis kemampuan Polri untuk mem-back-up satuan wilayah, sehingga bila terjadi gangguan keamanan, tidak sempat berkembang menjadi ancaman kontijensi. Lalu pada tahapan kampanye, sejak dini Polda Metro Jaya juga memonitor dan memberikan masukan kepada KPU. Dan pada saat kampanye, diterapkan pola pengamanan terbuka dan tertutup dengan sasaran; penyelenggara, juru kampanye, massa kampanye, lokasi, dan rute. Kemudian dalam pengamanan pemilu 2004, kekuatan yang diterjunkan sebanyak 13.610 personel, dengan rincian Polri 8.390, TNI

Pasalnya, waktu pelaksanaan pemilihan umum 1999, ditemukan adanya problem pengamanan yang kurang maksimal. Dimana satu anggota Polri ditugaskan untuk mengamankan sejumlah TPS, sehingga tidak dapat bertindak maksimal bila terjadi gangguan keamanan. Karena bertindak hanya mengandalkan satu orang saja, dengan demikian kekuatan akan sangat minin dan tak akan terlihat kerja sama tim. Padahal penanganan suatu kejadian akan sangat maksimal bila yang turun adalah terdiri satu tim yang solid.

Dengan pengalaman tersebut, nantinya—pada tahapan pemungutan suara, Polda Metro Jaya akan menerapkan Pola Beat, yaitu rute patroli. Sebuah pola pengamanan yang mengedepankan mobilitas rute patroli yang mampu memonitoring dan mengendalikan suatu beat (area/rute) tertentu sesuai dengan tingkat kerawanan area masing-masing. Patroli yang menitik beratkan pada kemampuan *team work*. Dalam menjalankan tugasnya, sejumlah TPS dijadikan beat patroli. Sehingga satu

secara kontinu (mobile) dan stand-by di titik-titik rawan pada saat berlangsung pemungutan suara dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Setiap kendaraan dilengkapi dengan HT dan HP (handphone) agar bisa berhubungan dengan seluruh unit patroli beat di Polda Metro Jaya. Kemudian sebagian dari mobil patroli juga dilengkapi dengan system GPS, sehingga posisinya dapat dimonitor langsung oleh pimpinan melalui Command and Control Centre yang dipusatkan di Biro Operasi Polda Metro Jaya (Puskodal Ops). Dan di tiap TPS ditempatkan dua anggota Linmas yang dilengkapi dengan satu handphone untuk sarana komunikasi dengan tim patroli beat.

System kerjanya; 1 unit patroli bisa mengcover satu area beat yang terdiri dari beberapa TPS. Untuk daerah aman, satu mobil dapat mengcover; 20-25 TPS. Kemudian untuk daerah rawan, satu Beat mengcover lebih kurang 12 TPS. Adapun untuk petugas beat yang mengcover daerah aman terdiri dari empat anggota Polri. Untuk

Dalam Pam Pemilu 2004

1.980 (On call di markasnya masing-masing) dan Pamswakarsa/Linmas 3.240.

Latar Belakang Pola Beat

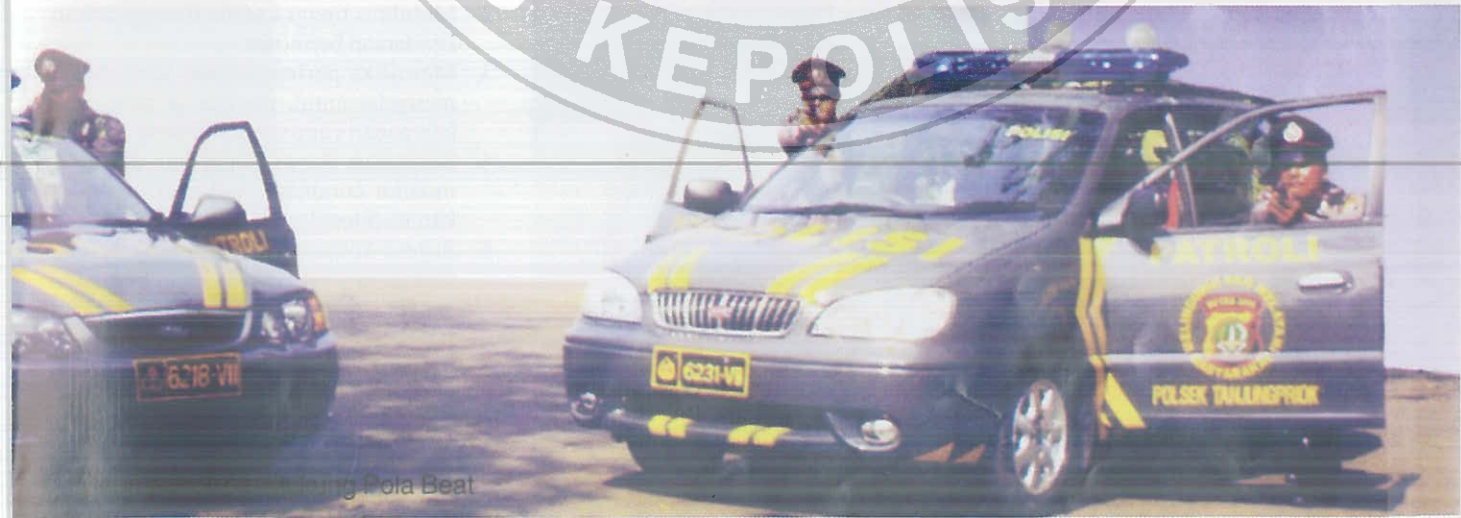
Ide atau gagasan pola beat ini muncul atas dasar pengalaman pemilu sebelumnya.

beat yang terdiri dari 12 hingga 25 TPS, akan dijaga oleh satu tim patroli yang diawaki oleh empat anggota Polri yang mempunyai kemampuan yang solid di bidangnya masing-masing.

Pola kerjanya yaitu melakukan patroli

daerah rawan, satu tim terdiri enam anggota Polri, dan untuk daerah sangat rawan, 1 tim terdiri delapan anggota Polri.

Disamping mengamankan dan monitoring situasi saat pemungutan suara, tim patroli beat juga mengamankan kegiatan



...ing Pola Beat

pengangkutan kotak suara sebelum dan sesudah pemungutan suara. Dan sebagai back-up, patroli beat di siagakan kekuatan cadangan Brimob atau Samapta 1 SST untuk Polsek, 1 SSK untuk Polres, dan 5 SSK untuk Polda. Semua satuan tersebut pada pelaksanaannya tidak harus stand-by di kantor, tapi dapat disiagakan pada titik tertentu yang dianggap rawan.

Adapun sarana transportasi yang dipergunakan untuk menunjang pola beat, meliputi; mobil roda empat dan roda enam. Kemudian sepeda motor, untuk mengcover daerah yang tidak dapat dilalui mobil (gang-gang kecil). Dan untuk daerah perairan (pulau seribu) dipergunakan kapal atau speed boat. Selengkapnya dukungan transportasi yang dipergunakan sebanyak; kendaraan roda empat 1.880 unit, kendaraan roda dua 5.024 unit, dan kendaraan roda enam 164 unit, serta kapal/speed boat 14 unit.

Salah satu kunci keberhasilan Pola Beat adalah efektifitas dukungan jaringan komunikasi dari tingkat Polda, Polres, Polsek hingga ke Tim Beat dan kepada anggota Linmas yang

berada di TPS. Ada lima macam metode komunikasi yang dipergunakan; pertama, Jaringan Komunikasi Radio Trunking, yang telah link-up dari Polda, Polres hingga ke Polsek-polsek sampai ke patroli Beat, baik menggunakan HT maupun radio Stasioner. Kedua, Jaringan HT Lokal, (frekuensi 2 meteran) ang justru cukup efektif dalam kawasan local. Metode ini dapat digunakan oleh anggota Linmas dan Patroli Beat serta



anggota masyarakat lainnya.

Ketiga, Jaringan Telepon/Handphone, dapat menjangkau Polda, Polres, Polsek, Patroli Beat hingga anggota Linmas di TPS-TPS. Karena HT tidak mencukupi untuk patroli beat, maka dapat digunakan fasilitas handphone dan HT local (frekuensi 2 meteran). Keempat, jaringan radio FM 91.1 Suara Metro, terintegrasi dengan call center 112, yang dapat menjangkau baik Polri maupun masyarakat untuk berinteraksi berkaitan dengan peristiwa/kejadian pada

saat pengamanan pemilu.

Kelima, Sistem Internet Online, yang memuat data-data rinci dari TPS dan beat mulai dari tipologi, karakteristik dan personel serta data lainnya. Dengan system ini petugas yang berwenang dapat mengakses data dengan cepat guna menentukan tindakan yang diperlukan.

Dengan menggunakan pola Beat yang diterapkan Polda Metro Jaya dalam menghadapi Pam Pemilu khususnya pada saat pemungutan suara, akan diperoleh beberapa keuntungan;

1. Kekuatan akan lebih solid karena personel Polri berada dalam ikatan Tim yang minimal empat orang dan tidak terpecah di TPS-TPS.
2. Mobilitas tinggi karena menggunakan kendaraan bermotor.
3. Memiliki perlengkapan yang lebih memadai untuk mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di Beat-nya.
4. Sebagian dapat dipantau di layar monitor command and control centre karena dilengkapi dengan GPS.
5. Sistem komunikasi lebih baik karena dilengkapi HP untuk Tim Beat dan anggota Linmas, serta HT pada tiap Tim Beat.
6. Kekuatan cadangan yang cukup besar di kantor Polsek, Polres, dan Polda.

Pilot Project

Guna untuk menjabarkan dan melak-





sanakan bijak Kapolda Metro Jaya, polres Metro Jakarta Utara, adalah satu-satunya polres yang sampai saat ini merupakan pilot projek untuk pengamanan pemilihan umum 2004, di wilayah Polda Metro Jaya. Pasalnya, di polres Jakarta Utara sudah terdapat Control Command Centre yang selalu on line dan dapat/teloh mengakses program sistem informasi pengamanan pemilu (Sipamlu) dan pemantauan pemilu 2004, termasuk

pada tahapan pemungutan suara yang menggunakan pola beat.

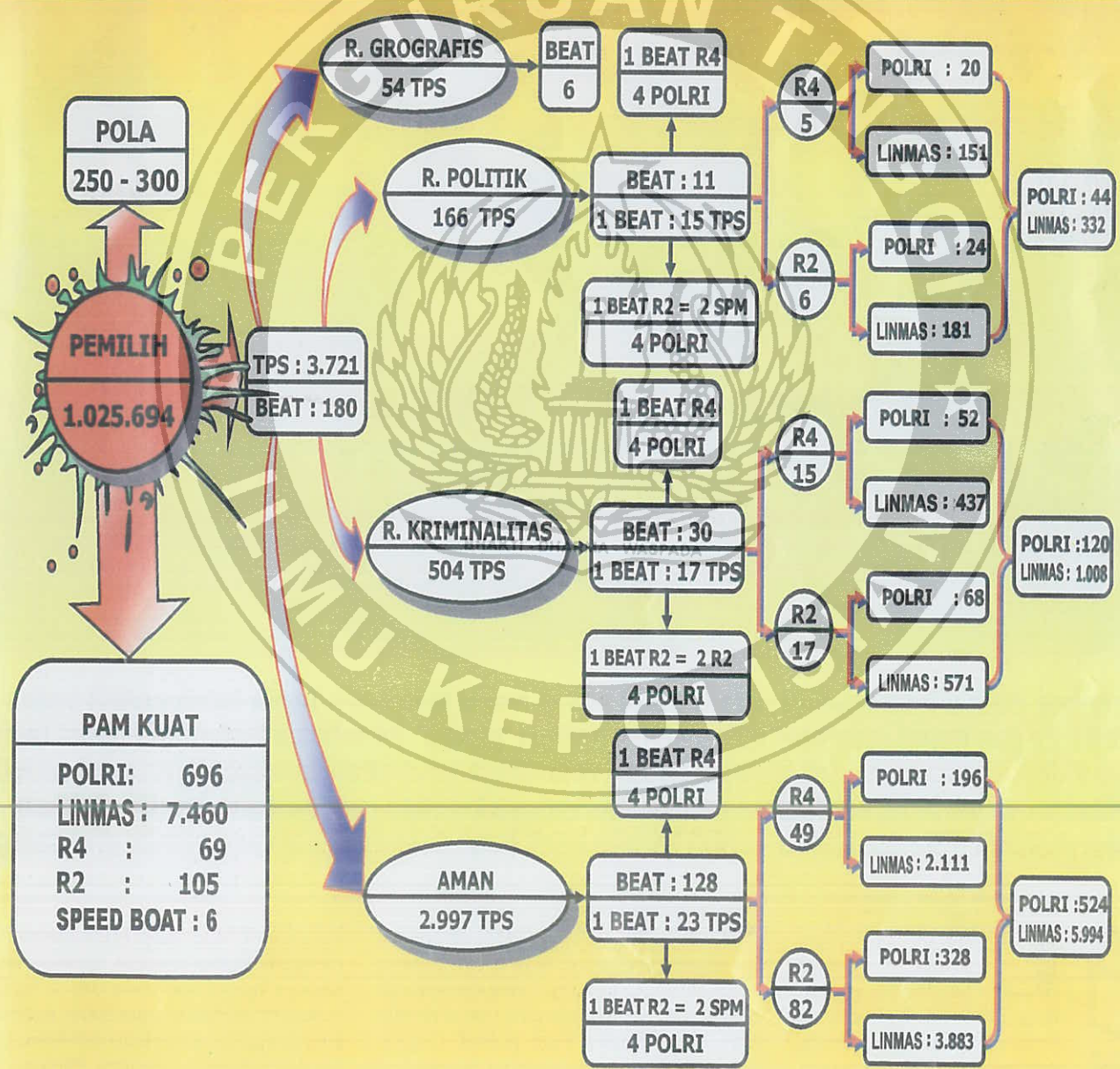
Dengan diterapkannya Pola Beat oleh Kapolda Metro Jaya, Injen Pol Drs Makbul Padmanagara, pada tahapan pemungutan suara nanti, berarti tidak ada persoalan rumit bagi polres Jakut. Sampai saat ini semua data yang diperlukan untuk Pam TPS pemilu 2004, sudah didatakan oleh CCC. Misalnya, ada pejabat Polri, maupun

muspida setempat ingin melihat sampai sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Polda Metro Jaya, jawabnya ada di polres Metro Jakarta Utara.

Di polsek Koja misalnya, disitu ada berapa TPS, siapa anggota Linmasnya, dan Iptu Bambang berada di beat berapa? dapat dilihat/teloh didatakan di komputer on-line Sipamlu 2004.

☑ BUDI

PAM TPS PEMILU 2004 POLRES JAKARTA UTARA DENGAN POLA BEAT PATROLI





AKANKAH PEMILU BER



Eskalasi politik menghadapi pemilu 2004 sudah mulai memanas. Intrik-intrik politik sudah bertebaran dan dapat membuat telinga para politisi "panas". Penolakan terhadap Politisi busuk terus didengungkan oleh sekelompok orang. Dikuaknya kesalahan-kesalahan rezim masa lalu, ditebarnya perilaku korup para politisi. Munculnya kembali isu golongan "putih". Bahkan pengrusakan beberapa kantor parpol karena tidak puas dengan penetapan nomor urut caleg.



2004
PEMILIHAN UMUM

hanas, Ermaya Suradinata, awal Oktober

LALU, beberapa pihak mulai berprediksi, pemilu akan dipenuhi kekerasan, berjalan tak sesuai jadwal, atau bahkan tak terlaksana sama sekali. Gubernur Lem-

2003 mengatakan, Pemilu 2004 berpotensi diwarnai kerusuhan akibat kurangnya sosialisasi UU Pemilu. Hampir seluruh masyarakat masih belum tahu sistem pemilu yang baru. Hanya elite politik tingkat menengah ke atas yang dapat memahami sistem tersebut.

Pembicaraan semakin hangat ketika

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengemukakan temuan intelijen tentang adanya upaya sabotase untuk menggagalkan Pemilihan Umum 2004. Keterangan lebih lanjut diungkapkan oleh Ketua Badan Intelijen Negara Hendro Priyono yang memprediksikan bahwa setidaknya ada lima ancaman potensial yang dihadapi oleh



DARAH?

bangsa Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2004 yaitu terorisme, separatisme, kolonialisme/neo imperialisme, ultra liberal dan komunisme.

Menurutnya, kalau teroris tidak dihajar sekarang ini maka mereka akan menghajar Indonesia. Selain itu, separatisme juga semakin menggejala di Indonesia khususnya di Aceh dan Papua. Soal neoimperialisme dan kolonialisme, kata Hendropriyono, muncul di Indonesia karena memang kita sedang mengalami krisis ekonomi yang akut dan sulit diselesaikan sehingga kaum neo imperialisme bisa gampang menjajah Indonesia. "Tidak secara fisik tapi menyumbang uang secara mengikat," tandasnya. Sedangkan, ultraliberal menjajah Indonesia melalui antek-anteknya. Begitu juga, komunisme tetap menjadi bahaya yang potensial walaupun laten.

Indira Samego, Pengamat politik dari The Habibie Centre, menilai data intelijen itu masuk akal. Karena memang ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghendaki agar reformasi yang sudah berjalan lima tahun ini berhenti di tengah jalan. Kelompok-kelompok ini tidak lemah, tapi punya kekuatan untuk mengganggu masyarakat dan memberi image bahwa proses reformasi hanya menimbulkan kesengsaraan. Kemudian, kelompok yang disebutnya "elemen lama", bisa menghembuskan bahwa proses reformasi hanya menimbulkan kekacauan, chaos serta disintegrasi. "Kelompok itu adalah mereka yang akan merasa menjadi korban kalau penegakan hukum dilakukan," kata Indira Samego. "Kelompok yang mampu menggagalkan pemilu adalah kelompok yang kuat dan memiliki infrastruktur sampai di tingkat bawah," tambahnya.

Prediksi pun tak berhenti. Baru-baru ini, Susilo Bambang Yudoyono, Menkopolkam menambahkan adanya tiga tantangan besar yang diperkirakan dapat menggagalkan Pemilu 2004 mendatang, yaitu politik uang, terjadinya kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Politik uang akan merajalela dengan jumlah yang amat besar tidak jelas dari mana asalnya.

Ancaman yang kedua yakni akan terjadi

kekerasan di seluruh tanah air. Kekerasan itu sendiri, lanjutnya, berasal dari mereka-mereka yang berkompetisi. Ia berharap pimpinan partai politik (parpol) juga dapat ikut serta mencegah terjadinya kekerasan.

Sedangkan ancaman terakhir, terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai tindakan yang bisa menggagalkan pemilu. Penyalahgunaan dilakukan oleh siapa saja yang punya wewenang, seperti bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, panglima TNI, kapolri, dan sebagainya. "Para pejabat itu harus terus mengikuti aturan main sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Kemungkinan terburuk

Menanggapi laporan intelijen TNI tentang ancaman kegagalan pelaksanaan Pemilu, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengatakan hal itu merupakan kemungkinan terburuk. "Kita memang kalau memprediksi diperhitungkan yang terburuk, supaya tidak terdada kaget," katanya.

Dia mengatakan dirinya setuju dengan berbagai analisis dari Panglima TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara). Mengenai masalah pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan dalam keadaan darurat militer, ia mengakui hal itu memang susah dipahami oleh masyarakat awam. "Pada dasarnya bagaimana masyarakat ada jaminan keamanan," katanya.

Kesuksesan berjalannya pemilu, tergantung dari langkah-langkah yang diambil petugas TNI dan Polri yang ada di sana. Jaminan keamanan dari pemerintah

menjadi sebuah keharusan agar masyarakat merasa aman datang ke bilik suara.

Pada kesempatan lain, Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar meminta partai politik peserta Pemilu 2004 untuk mewaspadai bahaya terorisme. Kelompok teroris bisa saja menyusup ke massa parpol saat musim kampanye mendatang. Peringatan Kapolri itu diungkapkan di sela pemberian penghargaan sektor kelautan dan perikanan oleh Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/1). "Kumpulan massa yang besar menjadi peluang untuk mengacaukan," ujarnya. Karena itu, Kapolri meminta kesadaran semua pihak, terutama massa parpol untuk waspada atas kemungkinan terjadinya penyusupan oleh seseorang yang ingin memanfaatkan momen tersebut.

Sinyal Kekerasan

Prediksi itu nampaknya mulai terjawab. Setidaknya sampai saat ini di Poso, Sulawesi Tengah masih menyimpan bara api. Masih akrab dengan cerita kekerasan berdarah yang terjadi Minggu (12/10) dini hari. Sekelompok orang bersenjata secara bersamaan menyerang empat desa hingga menewaskan delapan orang, melukai belasan lainnya, serta menghancurkan rumah-rumah penduduk. Kerusakan Poso, dipicu perkelahian dua pemuda yang berbeda agama pada Desember 1998. Kemudian berkembang menjadi konflik berbau SARA, dan memakan waktu yang panjang hingga sekarang.

Sebelumnya, Jumat (10/10) dini hari, kerusuhan terjadi di Beteleme, Kecamatan





Setengah jam kemudian, KPU didatangi massa lain dari partai yang sama. Mereka adalah kader yang tidak setuju dengan tindakan perampasan berkas itu. Mendengar kelompok kedua ini mendatangi KPU, kelompok PDIP pertama kembali lagi ke KPU. kelompok massa pertama adalah kader partai yang tidak puas dengan urutan nomor caleg yang didaftarkan oleh DPC.

Tak berbeda dengan PDI-P, puluhan massa dari PPP yang mendatangi KPU, juga dipicu dengan ketidakpuasan terhadap nomor urut calon legislatif. Sebelumnya mereka membakar beberapa dokumen dan merusak

Lembo, Kabupaten Morowali. Sebuah kabupaten yang merupakan pemekaran dari Poso. Tiga orang meninggal dunia dan puluhan rumah terbakar. Baik kerusuhan di Morowali maupun Poso, sama-sama ingin memperpanjang konflik berdarah di kabupaten itu. Pelakunya, tentu orang-orang yang tidak menghendaki stabilitas.

Sementara itu, di Bali kerusuhan terjadi antara warga Tabanan dan Buleleng. Sejak 1970-an, Buleleng dikenal sebagai "kawasan kuning". Masyarakatnya fanatik mendukung partai bergambar beringin. Ketika era Orde Baru tumbang, dukungan sebagian massa setempat beralih ke PDIP. Partai Golkar tampaknya ingin bernostalgia dengan merebut kembali massa pendukungnya di Buleleng. Sebaliknya PDIP yang gerah dengan kebangkitan partai beringin di pulau dewata. Dua kelompok pendukung Partai Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada jotos dan senjata tajam, Minggu, 26 Oktober 2003 lalu.

Memang ini bukanlah cerita baru. Konflik di Buleleng pernah terjadi Rabu,

11 Mei 1999 dan Minggu, 26 Oktober 2003. Ketika itu terjadi perkelahian massal ratusan orang di Kecamatan Banjar Buleleng. Tiga nyawa melayang. Pemicunya masalah politik. Konflik serupa terjadi pada 9 Mei 1999 di tempat yang sama, seorang tewas. Sebelumnya, juga terjadi pada Desember 1998, sebanyak 11 orang tewas.

Padahal, masyarakat Bali sangat berpegang teguh pada ajaran karma, karenanya kekerasan terhadap seseorang atau kelompok lain selalu dihindari. Akan tetapi, kekerasan bermotif politik mampu menembus batas norma agama.

Belum lama ini, di Garut, Jawa Tengah, muncul dua peristiwa ricuh dengan penyerbuan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut. Kericuhan pertama dimulai oleh massa PDIP. Selasa dini hari (20/1), sekitar 20 orang tak dikenal menyerbu masuk kantor KPU Garut. Massa PDIP meminta petugas KPU untuk menyerahkan berkas caleg yang sudah masuk.

kantor DPC PPP, Jalan Pembangunan Garut. Catatan lainnya, terjadinya tawuran antara massa PKB dengan GPK di Simpang Lima Semarang.

Peristiwa itu, melengkapi jawaban munculnya kekhawatiran terjadinya aksi kerusuhan pada Pemilu 2004. Namun, itu hanya setitik bara yang dibakar amarah politik. Konflik politik yang lebih besar makin terasa mencekam ketika konsolidasi partai makin intensif pada saat mendekati pemilihan umum (Pemilu) 2004, yakni saat kampanye dan pemilihan calon legislatif, yang dijadwalkan 5 April 2004. Kemudian masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

Jika semua terjadi, maka Pemilu 2004 menjadi perhelatan yang amat menakutkan. Ia bukan lagi pesta rakyat, melainkan berubah menjadi ajang kekerasan sesama anak bangsa. Tetapi semua itu hanya perkiraan. Mestinya semua pihak berusaha keras agar semua ramalan yang seram-seram dan menakutkan itu tidak terjadi pada Pemilu 2004. Haruskah darah ditumpahahkan atas nama kekuasaan? YIT

Kebanyakan orang ingin mengubah dunia untuk memperbaiki kehidupannya. Sungguh upaya sia-sia. Seandainya saja mereka memperbaiki dirinya sendiri, maka mereka akan menjadi lebih baik, demikian juga dunia.

-- Garth Henrichs--



TIGA SKENARIO

Penggagalan Pemilu 2004



KEKUASAAN, merupakan tujuan akhir dari percaturan politik. Tempat yang strategis untuk pengembangan ideologi. Semua partai ingin menempatkan kader-kadernya pada

posisi terhormat. Belum lagi fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang didapat karena kekuasaan. Karena itu, terjadilah penghalalan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

Pemilu menjadi sangat strategis bagi para pelaku politik untuk mendapatkan kekuasaan. Konflik-konflik politik akan menjadi kembangan lebih lanjut dari prosesi pemilu nanti. Bahkan potensi konflik pada Pemilu 2004 ini diperkirakan akan jauh lebih besar dari konflik-konflik Pemilu 1999 yang lalu. Ekonomi yang belum pulih, pengangguran yang semakin meningkat, korban-korban penggusuran telah menyebabkan banyak orang frustrasi. Kondisi tersebut, diperparah dengan separatisme yang terus menggejala, konflik antar etnis dan agama yang tak kunjung usai.

Sebuah kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa "terpinggirkan" dengan kekuasaan. Yakni pihak-pihak yang kecewa dan merasa

pemilu hanya akan melanggengkan diri dan kelompoknya di tempat yang terasing. Inilah yang ditengarai oleh Indira Samego, pengamat politik dari LIPI sebagai elemen lama yang merasa dirugikan dengan penegakan demokrasi. Potensi konflik ini akan lebih membesar apabila ada "skenario" politik yang dirancang oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan politik tertentu.

Ada tiga skenario yang mungkin dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan tujuannya. *Pertama*, dengan melakukan provokasi kepada masyarakat pemilih agar tidak berperan aktif dalam pemilu nanti. Pemilu, seolah-olah dianggap tidak mempunyai dampak positif bagi progresivitas bangsa Indonesia dan dianggap hanya melanggengkan orang-orang yang selama ini diuntungkan dengan kekuasaan.

Selain itu, mereka juga melakukan intrik dan desas-desus dengan menyebarkan isu-isu yang dapat meresahkan masyarakat. Menjelang pemilu 2004, kini berkembang santer isu "Kolor Hijau" yang suka memperkosakan ibu-ibu rumah tangga.

Namun isu berbau SARA-lah yang berpotensi paling besar untuk menciptakan konflik. Poso dan Morowali sampai sekarang terus bergejolak. Begitu juga dengan gerakan separatisme di Nanggro Aceh

Darussalam (NAD). Kesemuanya itu, agar masyarakat resah dan merasa ketakutan. Tujuan akhirnya, yakni terjadinya *chaos*, bentrok antar masa, baik partai politik maupaun kelompok agama, dengan intrik dan desas-desus yang dikembangkan tersebut.

Sedangkan sasarannya tidak lain hanyalah agar pemilu tidak terlaksana dengan baik. Sekitar 40 persen dari jumlah propinsi tidak bisa melaksanakan pemilu. Skenario ini akan dilaksanakan pada saat prapemilu khususnya ketika kampanye digelar. Masa kampanye menjadi saat yang paling rawan bagi terjadinya konflik.

Tak jauh beda dengan skenario Pertama. Skenario *kedua*, yakni dengan melakukan teror kepada masyarakat pemilih. Para pemilih dibuat ketakutan untuk melaksanakan haknya, bahkan untuk keluar rumah sekalipun, khususnya di malam hari. Kondisi masyarakat akan lebih mencekam dibanding skenario pertama. Dan akan terjadi menjelang pemungutan suara dilaksanakan. Hampir setiap menjelang pemilu, selalu saja terjadi berbagai peristiwa yang menggejarkan ditengah-tengah masyarakat. Sebelum pemilu 1999 lalu, pembunuhan berdalih dukun santet terjadi di Banyuwangi yang dilakukan oleh ninja. Padahal, yang kebanyakan menjadi korban adalah para guru ngaji, atau kyai. Isu lainnya, bisa menggunakan Hantu pocong seperti pada pemilu 1989.

Teror akan terus berlanjut ditengah-tengah perjalanan sampai dengan tempat pemungutan suara (TPS). Sasarannya agar 50 persen dari jumlah pemilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Mereka akan diancam dengan berbagai cara agar tidak berani mendatangi TPS dimana mereka akan memilih.

Skenario *ketiga*, yaitu dengan melakukan sabotase, *money politic* agar tercipta kekacauan (*chaos*) ketika pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Kelompok kepentingan ini berupaya agar pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan di sebagian besar propinsi. Upaya dilakukan dengan menghilangkan berkas data dan kotak suara. Hilangnya kedua sumber data ini, memungkinkan penghitungan suara tidak bisa dilakukan.

Selain itu, upaya lainnya dilakukan dengan merusak jalur transportasi agar pengiriman berkas tersebut tidak sampai kepada KPU pusat. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan pengrusakan terhadap sistem informasi yang digunakan oleh panitia pemungutan suara.





PETA KONFLIK



KECENDERUNGAN terjadinya pelanggaran serta persengketaan dalam Pemilihan Umum 2004 diperkirakan akan tinggi, bahkan lebih tinggi

dibandingkan dengan Pemilu 1999. Panitia Pengawas Pemilu menyatakan, 14 kabupaten atau kota di empat provinsi sebagai daerah rawan dalam pelaksanaan pemilu 2004 mendatang. Hal itu diungkapkan anggota Panwaslu Rozy Munir saat diskusi publik di kantor LBH Jakarta, Selasa (6/1).

Daerah-daerah rawan itu berada di daerah Nangroe Aceh Darusalam, Papua, Sulawesi Tengah dan Maluku. Di Aceh, yang masuk daerah rawan ada enam kabupaten, yakni Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Timur. Daerah ini rawan karena terdapatnya apatisme masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pemilu.

"Masyarakat di daerah *hot spot area* merasa pemilu sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi kemajuan kehidupan sosial mereka," ujar Rozy. Kerawanan lainnya karena kurangnya rasa aman dan karena masih berlangsungnya kekerasan bersenjata.

Di Papua terdapat empat kabupaten atau kota yang dikategorikan rawan, yaitu Jayapura, Sentani, Mimika, dan Manokwari. Daerah-daerah ini rawan akibat pemekaran wilayah, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, serta konflik antaretnis, selain kekerasan bersenjata.

Di Sulawesi kerawanan juga diakibatkan

oleh pemekaran wilayah serta segregasi wilayah yang berbasis pada agama dan etnis. Faktor pengungsi yang tidak kunjung tertangani juga menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Daerah yang dinilai rawan terdapat di daerah Poso dan Morowali.

Sedang di Maluku, kabupaten atau kota yang dianggap rawan adalah Ambon dan Maluku Tengah. Daerah ini diindikasikan rawan karena

partai yang akan menggelar pemilu agar membuat aturan-aturan bersama, terutama untuk menghindari hal-hal yang dapat memunculkan kerawanan. "Misalnya kalau di sana rentan kerawanan etnis, diupayakan agar para parpol tidak menyinggung masalah etnis dalam kampanyenya," ujar Rozy memberi contoh.

Khusus Jawa

Delapan daerah di Jawa ditengarai memiliki konflik yang besar berkaitan dengan tahapan-tahapan Pemilu 2004 yang berlangsung. Pemerintah dan partai politik diminta mewaspadaai daerah-daerah tersebut dan didesak segera menemukan mekanisme pengelolaan konflik di daerah tersebut. Lebih lanjut, daerah itu adalah Jakarta, Pekalongan, Jepara, Solo, Pasuruan, Situbondo, Sampang, dan Pamekasan.

Peringatan ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (19/1). Mereka yang memberikan keterangan adalah Tamrin Amal Tomagola (sosiolog dari UI), Usman Hamid (Kontras), Smita Notosusanto (Cetro), Rahlan Nashidik (Imparsial), Otto Syamsudin Ishak (Yappika), Benny Susetyo (Forum Kajian Demokrasi dan HAM Indonesia), dan Philip Jusario Vermonte (CSIS).

Tamrin mengatakan daerah tadi disebut rawan konflik karena tiga kriteria. Pertama, daerah itu memiliki potensi konflik ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terpendam. Kedua, konflik terjadi secara ritual di daerah tersebut. Ketiga, daerah itu memiliki akar konflik yang panjang. "Pemilu bisa menjadi pemicu bara konflik yang terpen-



adanya segregasi wilayah yang juga berbasis pada agama dan masalah pengungsi yang juga terdapat di daerah tersebut. Menurut Rozy, meski diindikasikan terdapat kerentanan, namun KPU maupun Panwaslu belum ada niat untuk melakukan penundaan pemilu di daerah tersebut. "Sebab kami sampai saat ini juga tidak menerima permintaan penundaan dari KPU di daerah tersebut," kata Rozy.

Rozy menambahkan, yang bisa dilakukan pihaknya hanya memfasilitasi partai-



dam. Pemilu memiliki potensi kekerasan pada dirinya sendiri dan Pemilu bisa jadi membawa penyelesaian bagi potensi-potensi konflik yang terpendam di daerah-daerah tersebut," kata Tamrin.

Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah memperkirakan ada sekitar 40 titik rawan konflik pemilu di Jateng. Potensi konflik terutama di daerah perbatasan provinsi serta di lintas kabupaten yang berada dalam satu daerah pemilihan.

Dalam penyusunan peta rawan konflik tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Jateng Nur Hidayat, bekerja sama dengan elemen masyarakat yang terkait, baik otoritas keamanan, perguruan tinggi, kekuatan politik, agamawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun kelompok lain dalam masyarakat. Untuk kepentingan pemetaan konflik pemilu, Panwas Jateng membagi tiga matriks konflik, yaitu konflik intern daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota, dan wilayah perbatasan dengan provinsi lain.

Pada Pemilu 1999 dan juga pemilu sebelumnya, kata Nur Hidayat, terdapat lebih dari 25 titik di perbatasan Jateng-Jawa Timur, Jateng-Jawa Barat, dan Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta yang rawan konflik pelanggaran dan persengketaan. Pada Pemilu 2004 diperkirakan daerah perbatasan tersebut masih tetap rawan konflik.

Untuk mengantisipasi konflik pemilu di daerah perbatasan tersebut, Panwas Jateng melakukan koordinasi dengan Panwas Jabar, Panwas Jatim, dan Panwas DI Yogyakarta (DIY). Ada tiga titik utama di perbatasan Jateng dengan ketiga provinsi itu yang harus diwaspadai, yaitu di Losari (perbatasan Jateng-Jabar), Kecamatan Salam (Jateng-DIY), dan Sarang (Jateng-Jatim).

Dengan diberlakukannya sistem baru pada Pemilu 2004, diperkirakan akan terjadi distribusi konflik atau konflik akan lebih menyebar. Terdapat potensi konflik baru, yaitu konflik di lintas kabupaten/kota yang berada dalam satu daerah pemilihan. Seperti wilayah Jateng yang terbagi dalam 10 daerah pemilihan (DP). Rata-rata tiga kabupaten tergabung dalam satu DP.

Konflik di lintas kabupaten/kota dalam satu DP ini terkait dengan pola kampanye peserta pemilu. Ini akan memicu konflik ketika ada jadwal kampanye yang seragam di satu DP. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan dapat menyusun jadwal kampanye sebaik-baiknya. MAN

JADWAL KEGIATAN PEMILU 2004

MARET-APRIL 2004:

- 11 Maret - 1 April : Pelaksanaan Kampanye
- 2-4 April : Masa Tenang
- 5 April : Pemungutan suara untuk memilih anggota legislatif (DPR/DPRD) dan DPD
- 21-28 April 2004 : Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD secara nasional
- 29-30 April 2004 : Penetapan perolehan kursi DPR, DPD dan DPRD

MEI 2004:

- 1-7 Mei : Pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden ke KPU oleh Parpol/gabungan Parpol
- 19 Mei : Penetapan, pemantauan nomor urut, dan pengumuman calon Presiden/Wakil Presiden

JUNI - AGUSTUS 2004 : Pemilu Capres/Wapres:

- 1 Juni-1 Juli : Kampanye Capres/wapres
- 2-4 Juli : Masa tenang
- 5 Juli 2004 : Pemungutan suara dan penghitungan suara (Putaran pertama)
- 26 Juli 2004 : Pengumuman hasil Pemilu tahap pertama secara nasional
- 30 Juli-5 Agt : Penetapan 2 pasang calon Presiden/Wakil Presiden untuk putaran kedua

SEPTEMBER 2004 : Pemilu capres/wapres putaran kedua (jika ada)

- 14-16 Sept : Kampanye
- 20 Sept : Pemungutan suara dan penghitungan suara putaran kedua

OKTOBER 2004:

- 5 Okt 2004 : Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu presiden/wapres tahap kedua secara nasional
- 20 Okt 2004 : Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.